

# ASEAN'S REGIONAL MECHANISM; ASEAN DAN PERDAMAIAN KAWASAN MELALUI SECURITY COMMUNITY

oleh Rifqi Itsnaini Yusuf  
(Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Peradaban.  
[rifqi.itsnaini@gmail.com](mailto:rifqi.itsnaini@gmail.com))

## Abstrak

**K**omunitas Keamanan ASEAN merupakan sebuah platform yang diharapkan dapat bekerja maksimal guna mendukung secara terus menerus perdamaian di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Security Community (ASC)* diharapkan mempromosikan sebuah bentuk kerja sama yang lebih luas didalam bidang politik serta keamanan di kawasan Asia Tenggara yang tidak hanya terpaku terhadap aliansi militer, pakta kesepakatan atas keamanan, ataupun perjanjian politik maupun keamanan semata. Mekanisme di dalam ASEAN dipandang mampu menyelesaikan masalah internal yang muncul di dalam ASEAN itu sendiri. Namun seiring dengan tantangan era yang semakin terbuka dan penuh dengan kompetisi, ASEAN harus segera menyiapkan diri dalam konteks keamanan yang lebih luas melalui ASEAN Security Community ini.

**Kata kunci:** ASEAN, keamanan, komunitas, perdamaian, regional.

## Abstract

**T**he ASEAN security community is a platform which is expected to work optimally to continuously support peace the Southeast Asian region. The ASEAN Security Community (ASC) is expected to promote a broader form of cooperation in the political and security sector in the Southeast Asia region which is not only fixated on military alliances, treaties on security, or solely political or security agreements. Mechanisms within ASEAN are seen as capable of resolving internal problems that arise within ASEAN itself. However, in line with the challenges of an era that is increasingly open and full of competition, ASEAN must immediately prepare itself in a broader security context through this ASEAN Security Community.

**Keyword:** ASEAN, security, community, peace, regional.

## **I. PENDAHULUAN**

**K**awasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan regional yang paling dinamis di dunia dan mempunyai potensi ekonomi dan konflik yang cukup besar. Sebagai organisasi regional ASEAN mempunyai peran yang cukup unik dalam mengolah kedua potensi yang ada di kawasan ASEAN. Di dalam Deklarasi Manila yang ditandatangani tanggal 15 desember 1987, kepala Negara dari 6 anggota ASEAN seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menegaskan kembali tekad mereka untuk menciptakan sebuah zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas atau yang lebih akrab disebut ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) di kawasan tersebut. Akan tetapi meskipun deklarasi tersebut mengikat, potensi konflik masih cukup besar terjadi di kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini akan coba melihat peran ASEAN dalam mengupayakan perdamaian, baik antar Negara member ASEAN, maupun dunia pada umumnya melalui *security community*.

Terbentuknya ASEAN beserta peranannya melalui diplomasi dikalangan elit, mampu menghadirkan perdamaian. Meskipun ada perdamaian, bukan berarti intensitas dari konflik antar negara-negara anggotanya menghilang. Hal itu tetap ada, namun keengganan negara-negara anggotanya untuk ikut campur lebih jauh melalui norma-norma yang ada di kawasan tersebut membuat konflik tersebut bisa diredam, yang pada tahap selanjutnya bisa menjadi pondasi perdamaian dan keamanan regional. Pakta pertahanan keamanan, yang dulu hendak dibentuk atas inisiasi Amerika Serikat sebelum terbentuknya ASEAN, bukan merupakan jawaban atas konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya Negara-negara di Asia Tenggara mengenal organisasi regional pada saat terbentuknya SEATO (Southeast Asia Treaty Organization). Organisasi ini sebenarnya lebih merupakan upaya Amerika untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia sehingga lebih merupakan prakarsa dari luar kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terpecah menjadi dua bagian. Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina tetap membina hubungan baik dengan negara-negara Barat. Malaysia dan Singapura terikat dengan kerjasama keamanan dengan Inggris bersama-sama dengan Australia dan Selandia Baru. Demikian pula Thailand dan Philipina yang memiliki hubungan sejarah panjang dengan Amerika. Negara-negara ini pada umumnya mendukung kebijakan Amerika di Vietnam Selatan. Sebaliknya, Indonesia, khususnya sebelum kudeta PKI, dikenal cenderung ke blok komunis karena kedekatan Sukarno dengan pemimpin-an Cina dan Uni Soviet.

Organisasi yang dibentuk sepenuhnya oleh negara-negara Asia Tenggara untuk pertama kalinya adalah the Association of Southeast Asia (ASA) pada 1961. Negara anggotanya adalah Malaysia, Filipina, dan Thailand. Organisasi regional awal tidak bertahan lama karena pecahnya konflik Filipina dan Malaysia atas status daerah Sabah yang diklaim

sebagai bagian dari Filipina. Berdasarkan perjanjian SEATO ini, para anggota perjanjian akan memberikan bantuan militer kepada negara anggota lainnya yang diserang oleh pihak luar. Pada 30 Juni 1975, SEATO dibubarkan setelah terjadinya perubahan besar di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terkait dengan kekalahan AS dalam perang Vietnam.

Konflik Malaysia dan Filipina mendorong terbentuknya Maphilindo (Malaysia, Filipina, dan Indonesia), akan tetapi organisasi ini pun bernasib sama karena Indonesia, melalui presiden Soekarno, menentang pembentukan Malaysia. Politik konfrontasi yang dilancarkan Soekarno menghancurkan struktur dasar Maphilindo. Namun dengan tumbangannya rezim Soekarno dan kemunculan Soeharto yang cenderung anti komunis, Indonesia kembali berpeluang untuk terlibat dalam perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Pada 1967 ASEAN terbentuk yang dengan sendirinya melibatkan Indonesia di dalamnya.

## II. KERANGKA ANALISIS

**A**sia Tenggara adalah salah satu dari sekian banyak kawasan yang memiliki banyak konflik dan permasalahan, kebanyakan konflik tersebut berupa konflik laten antar negara ataupun konflik internal di dalam negara sendiri. Tanpa ASEAN sangat sulit untuk memadamkan api-api konflik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini. Salah satu kekuatan integrasi ASEAN terletak pada mengambil keputusan yang berdasarkan konsensus dan mekanisme pengambilan keputusan secara jelas dan tegas yang tertuang dalam ASEAN Charter. Akan menjadi menarik untuk membahas keberhasilan ASEAN dalam menciptakan resolusi konflik untuk permasalahan-permasalahan internal dan kesulitan yang ASEAN hadapi dalam konflik-konflik tersebut terutama menyangkut prinsip ASEAN: *Non-Intervention*, apakah prinsip tersebut mempunyai pengaruh positif maupun negative bagi ASEAN dan Negara-negara anggotanya.

ASEAN Charter sendiri merupakan sebuah bentuk konstitusi untuk ASEAN. Konstitusi ini berarti semua negara yang menjadi anggota ASEAN wajib dan harus mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi tersebut. Sedangkan jangkauan dari *Rule of Game* yang ditetapkan di dalam ASEAN Charter tersebut menyangkut hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Termasuk didalamnya juga ditetapkan kesamaan pandangan bahwa ASEAN merupakan wilayah yang bebas nuklir. Pada dasarnya ASEAN Charter ini mengarahkan kepada para anggota agar mempunyai satu visi dan misi ke depan untuk memajukan kesejahteraan dan kelanggengan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN.

Perdamaian sendiri bisa diidentifikasi menjadi dua, yaitu *positive peace* dan *negative peace*. *Negative peace* adalah kondisi dimana kekerasan atau konflik sudah tidak ada lagi atau dimana situasi perdamaian mengandung unsur konflik atau suasana dimana

rekonsialisasi pasca-konflik sehingga konten-konten konflik sebelumnya masih sangat terasa dan sangat potensial menghasilkan konflik baru jika tidak ditangani dengan tuntas. Sedangkan positive peace adalah kondisi perdamaian yang tidak mengandung unsur konflik sama sekali sehingga kehidupan bernegara berjalan lurus tanpa ada beban dan hambatan yang mengganjal atau dengan kata lain kondisi ini adalah dimana segala sesuatu yang bisa memicu terjadinya konflik sudah tidak ada lagi, bukan sekedar keadaan dimana tidak ada kekerasan atau konflik itu sendiri. Peace adalah pencapaian yang dapat ditempuh dengan 3 pendekatan yaitu *strategic studies*, *security* dan yang terakhir adalah *conflict resolution*.

Pendekatan yang dikembangkan oleh Amitav Acharya berusaha melihat gejala pelembagaan perdamaian dan pengurangan kecenderungan peperangan di kawasan Asia Tenggara. Acharya melihat hubungan internasional di Asia Tenggara sebagai bentuk *security community*. Amitav Acharya berusaha mengangkat kembali cara pandang lama ini mengingat kemungkinan aplikasinya lebih tepat untuk memahami gejala hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Jika pendekatan sistemik masih mengandung keraguan tentang kemungkinan terjadinya instabilitas dan ketidakserasian, pendekatan *security community* membuka peluang lebih besar bagi pelembagaan sistem yang baru dalam proses pembentukan.

### III. PEMBAHASAN

**K**arl Deutschs mendefinisikan komunitas keamanan sebagai kelompok negara yang telah terintegrasi sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan damai antar negara di dalamnya telah terjalin dengan mapan dan dalam waktu yang cukup lama.

Komunitas keamanan dapat dibedakan dari aliansi atau pertahanan kolektif. Aliansi muncul dan berkembang sebagai reaksi atas munculnya pemahaman tentang adanya musuh bersama atau ancaman luar. Sebaliknya, di dalam komunitas keamanan tidak muncul pemahaman tersebut. Komunitas keamanan tumbuh dari adanya kepentingan dan identitas bersama di antara negara-negara anggotanya. Komunitas keamanan juga berbeda dari sistem keamanan kolektif karena beberapa hal. Pertama, keamanan kolektif menekankan adanya fungsi pemberian sanksi berupa hukuman. Sistem keamanan kolektif PBB, misalnya, menekankan pada pemberian hukuman bagi negara yang melakukan agresi terhadap negara lain. Sementara komunitas keamanan berusaha untuk menjadikan lembaga-lembaga bersama untuk mencegah munculnya tindakan agresif diantara negara anggota. Kedua, jika sistem keamanan kolektif mendukung penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, komunitas keamanan menganggap bahwa penggunaan kekerasan sebagai tindakan yang ilegal. Komunitas keamanan dengan demikian berusaha menghindari sejauh

dan selama mungkin adanya potensi peperangan di antara anggotanya, menentang penggunaan kekerasan, menghindari perlombaan senjata, mengembangkan organisasi sebagai upaya memperkuat iklim perdamaian dan mengembangkan identitas bersama secara terus-menerus untuk meneguhkan kehendak menghindari peperangan dan memelihara perdamaian di antara anggotanya..

ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka menjaga perdamaian di kawasan Asia. ASEAN mendorong perdamaian di kawasan Asia melalui perdamaian di kawasan ASEAN sendiri. Akan tetapi justru tingkat keaktifan Negara-negara anggota ASEAN dalam operasi perdamaian, baik yang dilakukan di kawasan ASEAN, Asia, maupun tempat lain tergolong rendah. Negara-negara anggota ASEAN bahkan lebih memilih cara bilateral dalam menyelesaikan masalah. Kekuatan militer yang tidak terlalu kuat dari Negara-negara anggota ASEAN juga menjadi pertimbangan yang penting. Diluar dari segala tujuan dan cita-cita yang dimiliki oleh ASEAN mengenai pembangunan kawasan Asia Tenggara kedepannya, ASEAN menurut beberapa ahli dianggap sebagai sebuah organisasi yang “unik” dimana organisasi ini memiliki beberapa faktor yang berbeda dengan organisasi regional lainnya. Salah satu contohnya adalah ASEAN menganut prinsip non-Intervensi. Yaitu sebuah prinsip untuk tidak ikut campur dalam permasalahan domestik maupun permasalahan bilateral yang terjadi diantara negara-negara anggota ASEAN.

Apabila kini kita melihat ASEAN dan secara spesifik ASEAN *Security Community* ini dalam perspektif konstruktivisme yang menekankan pada nilai, gagasan, serta norma yang berlaku disuatu wilayah dapat membentuk sikap dari suatu aktor yang dalam hal ini ASEAN. Setelah ASEAN berdiri lebih dari 40 tahun dengan peraturan-peraturan, prinsip kedaulatan , serta norma non-intervensi yang dimilikinya dapat dikatakan telah mampu meredam friksi-friksi yang timbul diantara anggotanya, sehingga menjaga wilayah Asia Tenggara dalam perdamaian. Semakin berkembangnya isu politik serta keamanan di dunia internasional, mendorong ASEAN untuk membentuk sebuah badan yang mengurus hal-hal strategis seperti keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Sehingga diinisiasi pembentukan ASEAN Community yang terdiri dari *ASEAN Security Community (ASC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*.

*ASEAN Security Community (ASC)* diharapkan mempromosikan sebuah bentuk kerja sama yang lebih luas didalam bidang politik serta keamanan di kawasan Asia Tenggara yang tidak hanya terpaku terhadap aliansi militer, pakta kesepakatan atas keamanan, ataupun perjanjian politik maupun keamanan semata. ASC juga berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan didalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Aspek-aspek tersebut menjadi kunci dan dengan adanya stabilitas politik serta kesejahteraan didalam

bidang ekonomi, dapat mempersempit kesenjangan pembangunan yang terjadi didalam kawasa, serta pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terbentuk didalam masyarakat dapat diatasi. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pondasi dasar bagi ASC guna pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung prinsip keamanan yang komprehensif.

Didalam usaha mewujudkan hal tersebut, ASC memiliki 6 buah aspek yang digunakan untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam pewujudannya. Yaitu:

1. Pembangunan Politik

Dalam hal ini negara-negara anggota ASEAN diwajibkan untuk memajukan politik serta mendukung pemimpin ASEAN didalam mencapai Visi bersama dan untuk mencapai perdamaian, stabilitas, demokrasi, serta kesejahteraan wilayah.

2. Membentuk dan Membagi Norma.

Hal ini bertujuan untuk mebuat standar umum atas kepatuhan terhadap norma-norma umum diantara negara anggota ASEAN, guna mengkonsolidasi, memperkuat solideritas ASEAN, serta berkontribusi terhadap pembangunan yang demokratis, toleran, dan menciptakan masyarakat yang partisipatif dan transparan

3. Pencegahan Konflik.

Pencegahan konflik ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan masyarakat, mengurangi ketegangan dan mencegah timbulnya perselisihan didalam negara anggota ASEAN maupun intra-ASEAN.

4. Resolusi Konflik

Seiring dengan berjalanya mekanisme resolusi konflik nasional, bilateral, dan internasional didalam penyelesaian suatu konflik yang dilakukan dengan cara damai. Anggota ASEAN harus berusaha menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa regional yang ada.

5. Penciptaan perdamaian pasca konflik.

Dalam penciptaan kondisi ini negara-negara anggota ASEAN harus saling membantu dalam bentuk kemanusiaan, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Guna menciptakan perdamaian serta mencegah timbulnya kembali konflik.

6. Mekanisme Penerapan.

Didalam mengambil langkah penerapan yang akan digunakan harus berkonsultasi dengan badan-badan kementerian yang terkait, yang dimana akan diadakan review menyeluruh mengenai kemajuan rencana yang digunakan. Serta dalam hal ini Sekjen ASEAN diwajibkan untuk memantau dan meninjau kemajuan dari rencana yang digunakan tersebut

Berdasarkan enam buah aspek tersebut kita dapat melihat hal yang menjadi perhatian ASEAN melalui ASEAN *Security Community* ini lebih kepada penciptaan sebuah indentitas

bersama yang dibangun melalui penstabilan politik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan Asia Tenggara. Sekarang tahun 2015 sudah kita masuki. Dengan semakin menipisnya waktu, Negara-negara anggota ASEAN harus segera bergerak untuk secepatnya memulai tindakan yang bisa menjadi dasar-dasar bagi terbentuknya ASEAN *Security Community* yang stabil dan baik, bukan hanya untuk jangka pendek namun juga untuk jangka panjang. Sehingga cita-cita ASEAN akan menjadi pelopor dalam perdamaian (*vanguard of peace*) dapat terwujud, bukan hanya untuk Negara anggota, Asia, namun juga dunia.

#### **IV. SIMPULAN**

**A**SEAN melalui ASEAN *Security Community* ini lebih kepada penciptaan sebuah identitas bersama yang dibangun melalui penstabilan politik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan Asia Tenggara. Sekarang tahun 2020 sudah kita masuki. Dengan semakin menipisnya waktu, Negara-negara anggota ASEAN harus segera bergerak untuk secepatnya memulai tindakan yang bisa menjadi dasar-dasar bagi berjalannya ASEAN *Security Community* yang stabil dan baik, bukan hanya untuk jangka pendek namun juga untuk jangka panjang. Sehingga cita-cita ASEAN akan menjadi pelopor dalam perdamaian (*vanguard of peace*) dapat terwujud, bukan hanya untuk Negara anggota, Asia, namun juga dunia. [].

#### **REFERENSI**

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*.
- Hanggi, H. (1991). *ASEAN and the Zopfan Concept*.
- John Funston, (2000). *ASEAN and the Principle of Non-intervention: Practice and Prospect*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Karl W. Deutsch. (1961). Security Community. Dalam James N. Resonau (ed.). *International Politics and Foreign Policy*. New York Free Press.
- Rodolfo Severino. (2006). *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insights from the Former ASEAN Secretary General*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- SEATO. (1963). *SEATO Collective security: Shield of freedom*. Bangkok.
- Ta-Wei Chu. (2014). *Perspectives on the Emerging ASEAN Political-Security Community: Motivations, Barriers, and Strategies*. The University of Leeds.